

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di sekitarnya. Manusia dan alam memiliki hubungan yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Alam memberikan pengaruh kepada manusia secara tidak langsung, sedangkan manusia cenderung memberikan dampak yang lebih nyata dan langsung terhadap alam. Karena itu, ketika lingkungan suatu daerah terpelihara dengan baik, maka kehidupan manusia di sana juga akan lebih baik. Sebaliknya, kerusakan lingkungan akan berdampak negatif pada kualitas hidup manusia.

Kualitas lingkungan hidup merupakan salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kondisi ekonomi. Perubahan dan pergeseran yang cepat pada pembangunan di segala sektor serta pengaruh globalisasi memberikan dampak terhadap kualitas lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup di Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang memprihatinkan akibat tekanan dari aktivitas manusia yang terus meningkat. Pencemaran udara, air, dan tanah menjadi persoalan utama yang dipicu oleh garis kemiskinan di Indonesia yang belum optimal. Kerusakan lingkungan juga diperparah oleh kepadatan penduduk yang mengakibatkan deforestasi, konversi lahan, dan eksplorasi sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan.

Penyebab kualitas lingkungan hidup yang menurun juga sebagai akibat dari aktivitas masyarakat dan kualitas sumber daya manusia yang kurang baik. Pada akhirnya akan menimbulkan kerusakan pada lingkungan itu sendiri, seperti peningkatan sampah, polusi, dan penurunan beban pada kandungan air. Jika kerusakan lingkungan tidak segera diatasi, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup yang dapat menimbulkan kerugian bagi banyak pihak (Hidayati & Zakianis, 2022).

Indonesia menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Terutama masalah sampah yang semakin memburuk. Setiap tahun, Indonesia menghasilkan lebih dari 60 juta ton sampah, dan sekitar 17% berupa plastik. Sebagian besar sampah ini tidak dikelola dengan baik, sehingga mencemari air sungai, udara, dan kondisi lingkungan sekitar. Pada tahun 2018, sungai Citarum menjadi contoh nyata salah satu sungai paling tercemar di Indonesia karena limbah industri dan sampah rumah tangga. Meskipun masih tercemar, dibuat program seperti Citarum Harum yang membantu meningkatkan kualitas air Citarum sehingga kini berada pada level cemar ringan (Lingga *et al.*, 2024).

Program yang telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dalam mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui program Bank Sampah, yang dikenalkan oleh Bambang Suwerda pada tahun 2008 dan sudah di sahkan dalam peraturan mentri LHK No. 15 Tahun 2021 sebagai pedoman penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Bank sampah merupakan sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas yang memanfaatkan sampah kering sebagai tabungan bernilai ekonomi. Masyarakat

berperan sebagai nasabah yang menyetorkan sampah, kemudian mendapatkan catatan tabungan yang dapat ditukar dengan uang atau barang yang dibutuhkan. Selain memberikan manfaat ekonomi, bank sampah juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan serta mengurangi permasalahan sampah di TPA (KLHK, 2025)

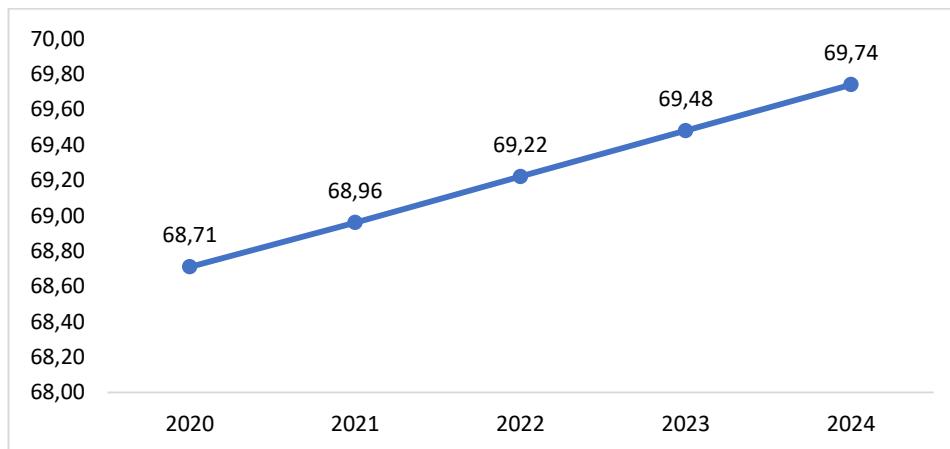
Jumlah nasabah bank sampah sebanyak 419.204 orang, dengan omset bulanan 2,8 miliar per Juli 2021, serta mampu melakukan pengurangan sampah sebanyak 2,7% dari total timbulan sampah nasional. Beberapa daerah yang berhasil dalam program bank sampah, salah satunya adalah Kabupaten Ciamis, Jawa Barat (BSC) yang meraih penghargaan Bank Sampah terbaik Nasional dari KLHK pada tahun 2023, yang menandakan keberhasilan programnya dalam pengelolaan sampah dan partisipasi masyarakat. Beberapa provinsi dan kota lain juga memiliki program bank sampah yang berprestasi seperti kota Pangkalpinang (Bangka Belitung), kota Yogyakarta, kabupaten Buleleng (Bali), dan provinsi-provinsi lain yang aktif ikut serta mengadakan bank sampah (KLHK, 2025)

Menurut teori Wackernagel dan Rees dalam (Dapas, 2015) kualitas lingkungan hidup adalah ukuran yang menunjukkan bagaimana keadaan dan kemampuan lingkungan dalam menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lain agar tetap sehat dan bisa berlangsung terus menerus.

Kualitas lingkungan hidup diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan skor keseluruhan skala 0–100%. IKLH merangkum kondisi kualitas lingkungan suatu wilayah berdasarkan parameter-parameter seperti Indeks Kualitas Air (IKA) dengan skor 30%, Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan skor 30%, dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) dengan skor 40%. Dengan demikian,

IKLH menjadi ukuran untuk mengevaluasi seberapa baik lingkungan hidup berfungsi dalam mendukung kehidupan dan kesejahteraan, serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dan pengelolaan yang lebih baik demi keberlanjutan ekosistem dan kualitas lingkungan hidup (Riansyah, 2024). Berikut

Gambar 1.1 perkembangan IKLH Indonesia tahun 2020-2024.



Gambar 1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indonesia Tahun 2020-2024 (poin)

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, 2024

Dari Gambar 1.1 di atas, dapat dilihat perkembangan IKLH di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu tahun 2020 sampai dengan 2024 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 IKLH di Indonesia mencapai 68,71 poin menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan kualitas lingkungan hidup di Indonesia masih dalam tahap keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya lingkungan dan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup. Pada tahun 2021 sampai dengan 2022 IKLH di Indonesia mulai meningkat karena dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan pembatasan mobilitas dan kegiatan ekonomi, sehingga berdampak positif pada kualitas udara dan lingkungan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022).

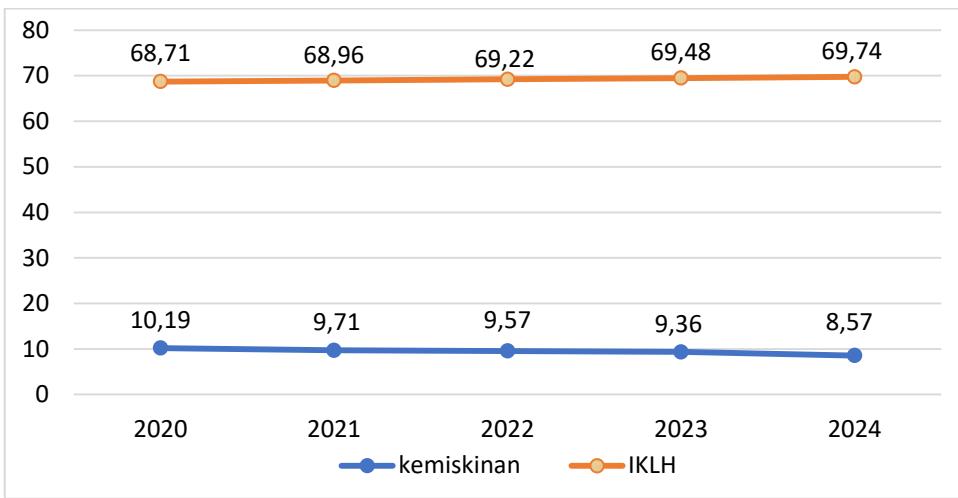
Tahun 2023 pemerintah mulai mengusulkan Program Kepemimpinan Hijau atau *Green Leadership* yang merupakan kebutuhan bersama dari para pemimpin di berbagai belahan dunia untuk dapat mengatasi dan meminimalisasi dampak negatif yang muncul dari kegiatan manusia dalam pembangunan. Pencapaian ini tentu saja keberhasilan dari kebijakan dan regulasi pemerintah yang lebih ketat dalam pengendalian pencemaran air dan udara dari industri serta transportasi. Sehingga pada tahun 2024 kualitas lingkungan meningkat mencapai 69,74 poin. Upaya pengendalian melalui beberapa program di tahun 2024 seperti “Zero Waste Zero Emission 2050” untuk merumuskan kebijakan penanganan sampah dan limbah berbahaya berbahaya sebagai bagian dari pengurangan emisi nasional dan juga program bank sampah sehingga Indonesia menapaki arah yang lebih positif dalam mengelola sampah dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup sepanjang tahun 2024 (Ditjen PPKL, 2024).

Menurut Ridena (2021) salah satu faktor yang mempengaruhi potensi kualitas lingkungan hidup adalah tingkat kemiskinan. Suparlan (2004) dalam Lembang *et al.*, (2019) menyatakan kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu kondisi kekurangan atau ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan pada tingkat yang dianggap layak oleh standar masyarakat tertentu. Kemiskinan yang sangat krusial akan mempengaruhi kesejahteraan, standar hidup, dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Banyak daerah miskin di Indonesia, seperti permukiman kumuh di bantaran sungai Jakarta, Medan, dan Surabaya, masyarakat terpaksa membuang

limbah domestik langsung ke sungai. Hal ini menyebabkan pencemaran berat terhadap air sungai yang berdampak pada turunnya IKU. Selain itu, di wilayah miskin pedesaan seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua, masyarakat masih menggunakan bahan bakar padat seperti kayu bakar dan arang untuk memasak. Praktik ini menghasilkan emisi zat berbahaya seperti PM2.5 dan *karbon monoksida* (CO), yang berkontribusi terhadap buruknya kualitas udara dan menurunkan IKU. Dalam kondisi lain, kemiskinan juga mendorong wilayah pedalaman Kalimantan dan Papua, banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan melakukan praktik perladangan berpindah (*slash and burn*), akibatnya degradasi lahan pun terjadi kerusakan ekosistem tanah menyebabkan penurunan nilai IKL (KLHK, 2024).

Pemerintah Indonesia melalui beberapa perencanaan, seperti dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 ditargetkan kemiskinan menurun sekitar 7% hingga 8%. Pemerintah juga membuat berbagai kebijakan, seperti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem untuk membuat berbagai program pengentasan kemiskinan melalui strategi dalam menurunkan beban pengeluaran, mendorong peningkatan pendapatan, dan penurunan jumlah orang miskin (Kemenkeu, 2024). Kondisi kemiskinan dan IKLH di Indonesia tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut:



Gambar 1.2 Tingkat Kemiskinan (Persen) dan IKLH (Poin) Indonesia Tahun 2020-2024

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024

Berdasarkan Gambar 1.2 di atas, dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun 2020-2024 terus mengalami penurunan. Tahun 2020 tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 10,19% yang disebabkan pembatasan mobilitas penduduk saat pandemi Covid-19 melanda di Indonesia yang menyebabkan terganggunya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 9,71% karena pemulihan ekonomi dari Covid-19, sehingga peningkatan daya beli masyarakat juga mulai seimbang, penurunan inflasi, dan perbaikan kondisi ketenagakerjaan serta program bantuan sosial mulai disalurkan kembali secara efektif pada tahun tersebut (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024).

Pada tahun 2022 kemiskinan di Indonesia terus menurun sampai tahun 2024 sebesar 8,57%, penurunan ini karena kebijakan bantuan sosial dari pemerintah seperti bantuan pangan beras dalam rangka menjaga akses pangan rumah tangga miskin serta menjaga stabilitas harga pangan. Program Keluarga

Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Indonesia Pintar (PIP) serta bantuan khusus lainnya seperti santunan anak yatim-piatu yang anggarannya terus ditingkatkan sehingga berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan (Kemenkeu, 2024).

Dari data kemiskinan terhadap kualitas lingkungan hidup tahun 2020-2024 terdapat fenomena menarik yaitu kemiskinan yang menurun menyebabkan peningkatan IKLH, alasannya adalah pemerintah Indonesia melalui KLHK (2024) dan Badan Pusat Statistik Indonesia (2024) secara berkala melaporkan bahwa penurunan kemiskinan di Indonesia bersamaan dengan peningkatan IKLH. Ini menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan bukan hanya aspek sosial ekonomi, tetapi juga memberi manfaat ekologis berupa peningkatan kualitas lingkungan hidup yang terukur secara nasional maupun daerah.

Fenomena tersebut sesuai dengan teori yang dikembangkan Neo-Marxian oleh Andre Gunder Frank pada tahun 1966 dalam Arifin (2012) tentang *underdevelopment* memiliki konsep ramah lingkungan sebagai aktivitas dan produksi yang menekankan kemiskinan dengan memanfaatkan sumber daya alam sehingga bisa menjaga lingkungan meningkat dengan baik, karena mereka sadar kualitas lingkungan yang baik akan berdampak baik bagi kehidupannya.

Menurut Puspitasari & Yuliawan (2023), selain kemiskinan, kepadatan penduduk juga berpengaruh terhadap kualitas lingkungan. Teori Malthus (1798) dalam Wargadinata (2021) mengemukakan tentang penduduk dalam “*Essay on Population*” yaitu bagaimana pertumbuhan penduduk bertambah atau berkurang dari waktu ke waktu.

Kepadatan penduduk juga menjadi masalah besar terhadap kualitas lingkungan hidup seperti Jakarta adalah salah satu kota dengan permukiman terpadat di Indonesia yang menyebabkan peningkatan limbah domestik dan pencemaran tinggi pada sungai serta saluran air. Hal ini meningkatkan parameter seperti BOD, COD, dan *coliform*, yang secara langsung menurunkan nilai IKA (CREA, 2024). Pada tahun 2023-2024, kualitas udara Jakarta sering berada pada tingkat “tidak sehat”. Kepadatan ini memperburuk IKU karena konsentrasi polutan meningkat seiring dengan jumlah penduduk dan aktivitas manusia (CREA, 2024). Penurunan ruang terbuka hijau, alih fungsi lahan menjadi permukiman padat, dan minimnya tutupan vegetasi juga faktor utama yang menurunkan nilai IKL di wilayah padat seperti Jakarta (Kondolele *et al.*, 2023)

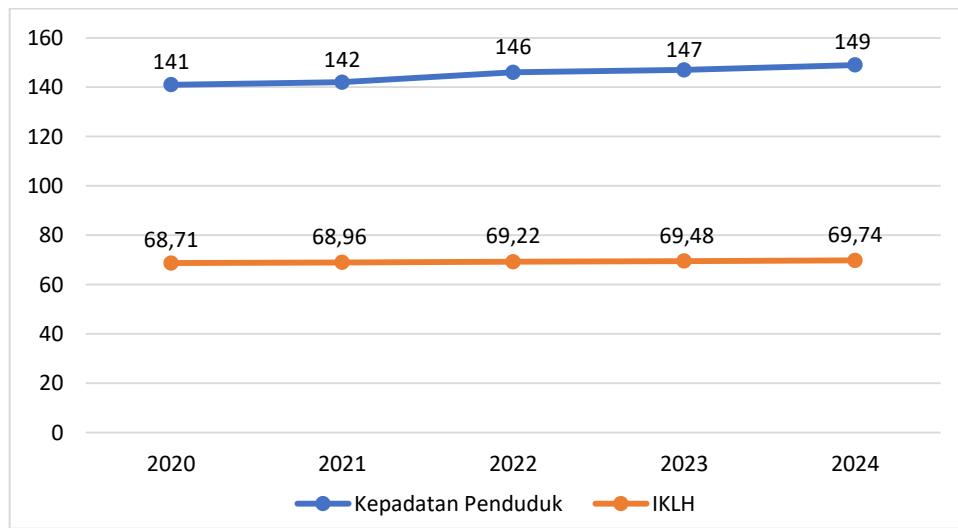
Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai program di setiap daerah untuk meminimalisi kepadatan penduduk yang berakibat fatal terhadap kualitas lingkungan hidup. Seperti Pemprov DKI Jakarta mendorong pembangunan permukiman vertikal (rusunawa) untuk menggantikan permukiman padat dan kumuh. Dengan harapan IKA membaik karena limbah rumah tangga tidak lagi mencemari sungai, IKU meningkat karena berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi akibat akses transportasi publik yang lebih mudah, dan IKL naik karena penggunaan lahan menjadi lebih legal, teratur, dan ramah lingkungan (DLH Jakarta, 2024).

Indonesia saat ini memiliki fenomena demografi yang sangat dinamis, dengan kepadatan penduduk rata-rata meningkat dari sekitar 141 jiwa/km² pada 2020 menjadi sekitar 149 jiwa/km² pada 2024, dan diperkirakan mencapai 157 jiwa/km² pada 2025. Pulau Jawa menjadi *episentrum* kepadatan tinggi,

menampung lebih dari setengah populasi nasional dengan *densitas ekstrem* hingga 1.183 jiwa/km² pada 2024. Sementara kota-kota besar seperti Jakarta bahkan mencatat angka puluhan ribu jiwa per km². Struktur usia mendukung potensi bonus demografi sekitar 68 % penduduk berada di usia produktif (15–64 tahun), dengan median usia pada kisaran 30 tahunan (BKKBN, 2024).

Usia produktif tersebut menyebabkan pertumbuhan penduduk di perkotaan terjadi begitu cepat sehingga lebih dari separuh penduduk di Indonesia saat ini tinggal di daerah perkotaan karena aktivitas ekonomi seperti lapangan pekerjaan yang lebih banyak, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lebih baik di perkotaan. Akibatnya, pulau Jawa khususnya wilayah metropolitan Jakarta, Surabaya, dan Bandung, menjadi wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi (BKKBN, 2024).

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah melakukan upaya-upaya untuk menekan angka kepadatan penduduk, misalnya dengan perencanaan kampung KB, mendorong perpindahan penduduk dari wilayah-wilayah dengan tingkat kepadatan tinggi ke wilayah yang memiliki kepadatan penduduk rendah. Distribusi penduduk juga dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya alam dan peluang ekonomi di suatu wilayah. Daerah-daerah dengan sumber daya alam yang melimpah diperlukan upaya-upaya seperti pengembangan infrastruktur, peningkatan aksesibilitas ke wilayah terpencil, pemberdayaan ekonomi di pedesaan, dan peningkatan kualitas layanan publik di seluruh wilayah Indonesia (Dita & Legowo, 2022). Kondisi kepadatan penduduk dan IKLH di Indonesia tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Grafik 1.3 berikut:



Gambar 1.3 Kepadatan Penduduk (Jiwa/km²) dan IKLH (Poin) Indonesia Tahun 2020-2024

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024

Berdasarkan Gambar 1.3 di atas, dapat dilihat kepadatan penduduk di Indonesia dari tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 kepadatan penduduk sebesar 141 jiwa/km² kemudian meningkat pada tahun 2021 sebesar 142 jiwa/km² yang dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19, sehingga meningkatkan aktivitas ekonomi dan aktivitas sosial, termasuk mobilitas penduduk antar daerah (BPS Indonesia, 2021).

Tahun 2022 kepadatan penduduk Indonesia naik sebesar 146 jiwa/km² disebabkan peningkatan jumlah penduduk pada suatu daerah dan pertumbuhan alami (kelahiran lebih banyak daripada kematian). Pada tahun 2023 kepadatan penduduk terus meningkat sebesar 147 jiwa/km² sampai dengan tahun 2024 yaitu sebesar 149 jiwa/km² yang disebabkan oleh penduduk yang melakukan urbanisasi dalam mencari peluang ekonomi dan layanan publik yang lebih baik.

Pertumbuhan penduduk di perkotaan terjadi begitu cepat sehingga lebih dari separuh penduduk Indonesia saat ini tinggal di daerah perkotaan (BKKBN, 2024).

Data kepadatan penduduk terhadap kualitas lingkungan hidup tahun 2020-2024 terdapat fenomena dimana kepadatan penduduk meningkat IKLH juga meningkat, alasannya peningkatan IKLH bisa terjadi meskipun kepadatan naik, karena pemerintah daerah meningkatkan investasi lingkungan seperti mengelola limbah lebih efektif di tengah kepadatan penduduk khususnya di kota-kota yang padat penduduk (Aldilla *et al.*, 2024).

Teori Malthus (1798) dalam Wargadinata (2021) yang menekankan kepadatan penduduk yang tidak terkendali dapat memberikan tekanan besar terhadap sumber daya alam, yang pada gilirannya menurunkan kualitas lingkungan hidup. Meskipun demikian kepadatan penduduk dapat meningkat kualitas lingkungan hidup sejalan dengan Teori Kota Kompak yang dikembangkan oleh Dantzig dan Saaty (1973) dalam Sulaiman (2023). Teori ini menyatakan bahwa kepadatan penduduk bisa menjadi hal yang baik bagi lingkungan jika dikelola dengan benar. Dengan banyak orang tinggal di satu tempat, penggunaan energi bisa lebih hemat, pelayanan publik seperti transportasi dan air bersih bisa disalurkan lebih murah dan efisien, serta perkembangan teknologi ramah lingkungan bisa terjadi lebih cepat. Kepadatan penduduk tidak selalu berdampak buruk, tapi justru bias membantu menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Sejauh ini telah dilakukan sejumlah penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan di Indonesia terutama terkait dengan

aspek-aspek kemiskinan dan kependudukan. Meskipun demikian, penelitian-penelitian dengan topik ini masih belum banyak dilakukan.

Penelitian Juliansyah *et al.*, (2025) menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kualitas lingkungan hidup. Penelitian Rohman & Suryanto (2023) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan dan ketimpangan memiliki hubungan negatif dan signifikan di Kabupaten Kebumen.

Penelitian Ridena (2021) menunjukkan arah negatif bahwa penduduk miskin di perkotaan dan ketimpangan pendapatan signifikan menurunkan kualitas lingkungan.

Penelitian Wulandari & Faridatussalam (2023) menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh positif terhadap kualitas lingkungan hidup di Pulau Jawa. Penelitian Firman (2023) menunjukkan bahwa kemiskinan dengan hasil korelasi positif terhadap IKLH di Kalimantan Barat dan hubungan kedua variabel tersebut sangat kuat.

Penelitian Aulia *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia dan kepadatan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas lingkungan hidup di 6 Provinsi Pulau Jawa. Penelitian Yani *et al.*, (2023) menunjukkan kepadatan penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas lingkungan hidup di Indonesia. Penelitian Ar'rida & Sopiana (2023) menunjukkan kepadatan penduduk berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap indeks kualitas lingkungan di 4 Provinsi Pulau Kalimantan.

Penelitian Kondolele *et al.*, (2023) bahwa pertumbuhan ekonomi dan kepadatan penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas

lingkungan hidup di Indonesia. Penelitian Ginting *et al.*, (2023) menunjukkan bahwa variabel kepadatan penduduk berpengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Kualitas Lingkungan hidup di Pulau Jawa.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda mengenai pengaruh tingkat kemiskinan dan kepadatan penduduk terhadap indeks kualitas lingkungan hidup. Penelitian ini memfokuskan pada variabel kemiskinan dan kepadatan penduduk sebagai variabel bebas dan melihat pengaruhnya terhadap indeks kualitas lingkungan hidup di Indonesia sebagai variabel terikat. Penelitian ini menggunakan metode Regresi Linier Berganda dengan jumlah observasi 21 tahun yaitu dari tahun 2004-2024.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“Pengaruh Kemiskinan dan Kepadatan Penduduk terhadap Kualitas Lingkungan Hidup di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh kemiskinan terhadap kualitas lingkungan hidup di Indonesia?
2. Bagaimanakah pengaruh kepadatan penduduk terhadap kualitas lingkungan hidup di Indonesia?
3. Bagaimanakah pengaruh kemiskinan dan kepadatan penduduk secara simultan terhadap kualitas lingkungan hidup di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh kemiskinan terhadap kualitas lingkungan hidup di Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh kepadatan penduduk terhadap kualitas lingkungan hidup di Indonesia.
3. Mengetahui pengaruh kemiskinan dan kepadatan penduduk secara simultan terhadap kualitas lingkungan hidup di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian maka manfaat penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Berikut adalah beberapa manfaat teoritis dalam pengembangan penelitian ini:

- a. Diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi secara akademik terkait bagaimana pengaruh kemiskinan dan kepadatan penduduk terhadap kualitas lingkungan hidup di Indonesia.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya dalam pengembangan kajian ilmiah yang berkaitan dengan pengaruh kemiskinan dan kepadatan penduduk terhadap kualitas lingkungan hidup, serta upaya dan solusi supaya kualitas lingkungan hidup terus membaik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Berikut adalah beberapa manfaat praktis dalam pengembangan penelitian ini:

- a. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan dan strategi terkait dengan kemiskinan dan kepadatan penduduk serta pengaruhnya terhadap kualitas lingkungan.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman mengenai pengaruh kemiskinan dan kepadatan penduduk terhadap kualitas lingkungan.